



**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**No. 108/C.02.01/LPPM/II/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
Jabatan : Kepala  
Unit Kerja : LPPM-Itenas  
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Indrianawati, S.T., M.T.	20121205	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Tempat : Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Waktu : 14 Oktober – 14 Desember 2020  
Sumber Dana : PT Effort Digital Multisolution

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 11 Februari 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas  
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NPP. 20010601

# **LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**JUDUL:  
PEMETAAN JARINGAN WILAYAH  
 PENYELENGGARA POS**

**KETUA TIM:  
INDRIANAWATI, M.T.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos  
Nama Mitra : Kementerian Komunikasi dan Informatika

### Ketua Tim Pengusul

NIDN/NIDK : 0410098605  
Nama lengkap (beserta gelar) : Indrianawati, M.T.  
Pangkat/Golongan : III-B  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi/Fakultas : Teknik Geodesi/Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Bidang Keahlian : GIS, Geodatabase, Spatial Analysis  
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung 40124  
Telepon/Faks Kantor : +62-22-7272215 / +62-227202892  
Alamat Rumah : Jatihandap  
Nomor HP/WA : 0821-3000-0151  
Email : indrianawati@itenas.ac.id  
ID Sinta : 6009895

### Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Wilayah Mitra : Jl. Merdeka Barat No.9 RW.3, Gambir  
• Desa/Kecamatan : Gambir  
• Kota/Kabupaten : Jakarta Pusat  
• Provinsi : DKI Jakarta  
• Jarak PT ke Mitra : 154 km  
Luaran yang dihasilkan : Database Titik Layanan Pos di Indonesia  
Waktu Pelaksanaan : 14 Oktober s.d. 14 Desember 2020  
Total Biaya : Rp 5.000.000,00  
Sumber pendanaan : PT EFORT Digital Multisolutions

Bandung, 11 Februari 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Ketua Tim Pengusul

  
Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

NIDN : 0412017610



Indrianawati, M.T.  
NIDN : 0410098605

Disahkan oleh :  
Ketua LP2M Itenas

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NIDN : 0403017701

## **KEGIATAN PEMETAAN JARINGAN WILAYAH PENYELENGGARA POS**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket sampai kepada alamat tujuan konsumen. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan tersebut salah satu diantaranya melalui penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang memungkinkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim dan menerima surat atau paket sebagai media komunikasi hingga sarana penunjang perekonomian.

Saat ini, pemetaan penyelenggara pos belum tersedia secara detail khususnya pemetaan Layanan Pos Universal. Dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisi-nya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di luar Ibu Kota Kabupaten. Diperlukan sebuah perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah dalam melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos, apalagi pada saat ini sudah banyak penyelenggara pos melaksanakan pembangunan, pengembangan wilayah pada daerah perkotaan dan daerah terpencil. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan pemetaan penyelenggara pos yang lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor pos.

Dengan adanya Kegiatan Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos ini diharapkan dapat diketahui posisi kantor pos subsidi dan non subsidi berdasarkan pengelompokan ataupun gambaran titik keramaian suatu kantor pos cabang, kegiatan penyelenggara pos lainnya serta dapat diketahui juga mengenai gambaran geografis suatu daerah atau area yang dapat terdeskripsi dengan jelas dimana suatu posisi kantor pos cabang subsidi berada. Pengembangan wilayah pembangunan kantor pos cabang baru sebagai akibat pemekaran wilayah sudah banyak dilakukan, oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan yang lebih terperinci mengenai posisi atau lokasi suatu wilayah baik letak yang didasarkan atas koordinat garis lintang dan bujur sebagaimana contoh lokasi kantor pos cabang Soreang, Bandung terletak antara 6°54' LS dan 107°36' BT, dan juga dapat memperhatikan ukuran (ukuran luas daerah dan jarak), memperlihatkan kecenderungan bentuk (benua, pulau, negara, gunung, arah pengembangan wilayah), menunjukkan ketinggian tempat atau sudut evaluasi berbagai wilayah dan objek geografis lainnya, mengumpulkan dan menyeleksi data atau informasi dari suatu daerah dan menyajikannya secara grafis dan nongrafis di atas peta sehingga dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam memutuskan perencanaan pemerataan pembangunan suatu wilayah sebagaimana sesuai Program Presiden terpilih dengan berpedoman Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 dan menjadi acuan pemetaan kantor pos cabang yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan pemetaan jaringan wilayah penyelenggara pos ini adalah melakukan pemetaan titik layanan pos di wilayah NKRI berbasis digital. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data titik layanan pos berbasis digital di wilayah NKRI untuk mendukung pemerataan akses layanan pos sehingga aksesibilitas masyarakat dalam menerima dan mengirim layanan Pos dapat terlayani.

## 3. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan Pemetaan Jaringan Wilayah Penyelenggara Pos ini lingkup wilayahnya adalah kantor pos cabang bersubsidi yang berada di luar Ibu kota Kabupaten sebagaimana pengembangan wilayah layanan pos mulai dari Regional I sampai dengan Regional XI tersebar setiap daerah yang telah dilakukan evaluasi oleh tim dengan merujuk peraturan dan perundangan yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah.

**Tabel 1 - Lokasi Pekerjaan dan Lingkup Area**

No	Kantor Regional	Lingkup Area
1	Regional I Pusat Medan	Prov. Aceh, Prov. Sumatera Utara
2	Regional II Pusat Padang	Prov. Riau, Prov. Kepulauan Riau, Prov. Sumatera Barat
3	Regional III Pusat Palembang	Prov. Bengkulu, Prov. Jambi, Prov. Lampung, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
4	Regional IV Pusat Jakarta	Prov. DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang
5	Regional V Pusat Bandung	Prov. Jawa Barat, Prov. Banten
6	Regional VI Pusat Semarang	Prov. Jawa Tengah, Prov. DI Yogyakarta
7	Regional VII Pusat Surabaya	Prov. Jawa Timur
8	Regional VIII Pusat Denpasar	Prov. Bali, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Regional IX Pusat Banjarbaru	Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Kalimantan Selatan
10	Regional X Pusat Makassar	Prov. Gorontalo, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara
11	Regional XI Pusat Jayapura	Prov. Papua Barat, Prov. Papua



**Gambar 1 – Sebaran Lokasi Kantor Regional Pos**

#### **4. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi sebaran titik layanan pos universal dan menyusun konsep wilayah layanan pos universal dengan mempertimbangkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur jumlah penduduk, infrastruktur, transportasi berdasarkan titik koordinat.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui survey lapangan serta pemetaan titik layanan terhadap suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan letak geografis yang dipertanggungjawabkan secara at cost yang dilakukan di daerah Regional Pos:
  - Regional 1 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Medan)
  - Regional 2 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Padang)
  - Regional 3 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Palembang)
  - Regional 4 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Jakarta)
  - Regional 5 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Bandung)
  - Regional 6 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Semarang)
  - Regional 7 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Surabaya)
  - Regional 8 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Denpasar)
  - Regional 9 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Banjarbaru)
  - Regional 10 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Makasar)
  - Regional 11 (Melaksanakan survey lapangan di Kota Jayapura)
- c. Mengumpulkan data dan menganalisa hasil survei dari masing-masing Regional dalam bentuk data base titik layanan pos universal.
- d. Membuat rekomendasi kriteria dan penyediaan titik layanan pos universal di wilayah NKRI khususnya di kawasan prioritas.
- e. Menyusun laporan kegiatan.

#### **5. Keluaran**

Dalam kegiatan pemetaan jaringan wilayah penyelenggara pos ini diharapkan menghasilkan keluaran berupa database titik layanan pos di wilayah Indonesia dan laporan kegiatan.

## DOKUMENTASI KEGIATAN

Recording

### Pendahuluan

- Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket hingga sampai kepada alamat tujuan konsumen (UU No.38/2009)
- Peta penyelenggara pos belum tersedia secara detail, khususnya pemetaan layanan pos universal, dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisinya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di luar ibu Kota Kabupaten.
- Diperlukan sebuah perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah untuk melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos.
- Perlu dilakukan kegiatan pemetaan penyelenggara pos yg lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor.



Recording

### Rekomendasi

- Selain melaksanakan survei langsung ke Kantor Regional, untuk melengkapi data juga disediakan form isian secara online yang dapat diakses dan diisi oleh kantor regional atau kantor cabang secara langsung. (<https://form.jotform.com/203152369133045>) – form ini bisa digunakan untuk updating secara kontinyu.
- Form isian untuk kelengkapan survei ini dapat diisi secara online dengan fitur unggah foto dengan geotagging, sehingga koordinat lokasi dapat langsung diketahui.
- Pemetaan digital dibangun menggunakan geodatabase standar dan menggunakan standar dasar nasional, geodatabase ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data pendukung Pos dengan tema-tema lain, sekaligus dapat dikembangkan untuk analisis spasial lainnya.
- Direktorat Pos, Kementerian Kominfo perlu melakukan survey dan pengumpulan data terhadap Perusahaan Jasa Telp dan/atau penyelenggara Layanan Pos Komersial guna menambah perbandingan database.



Recording

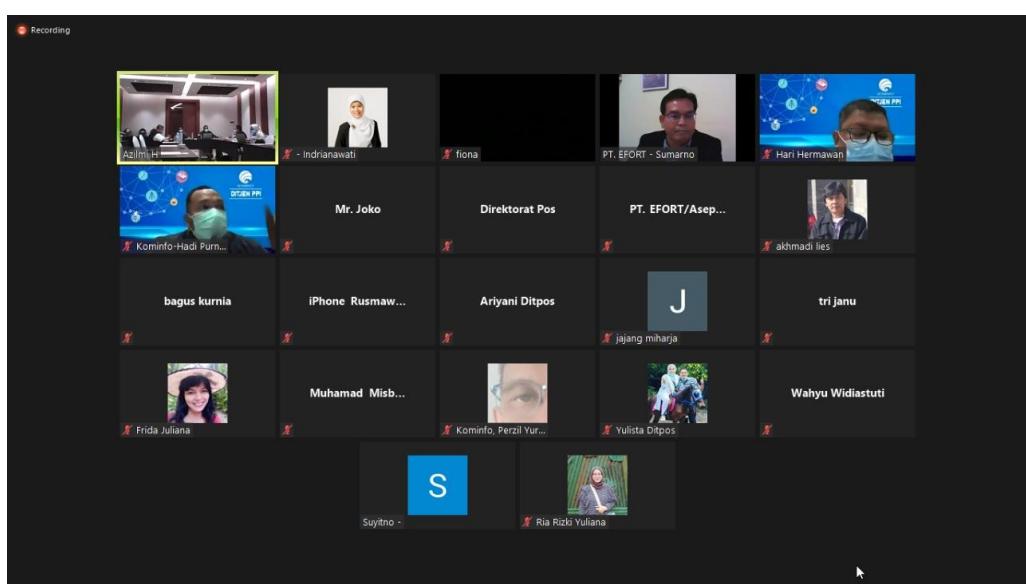
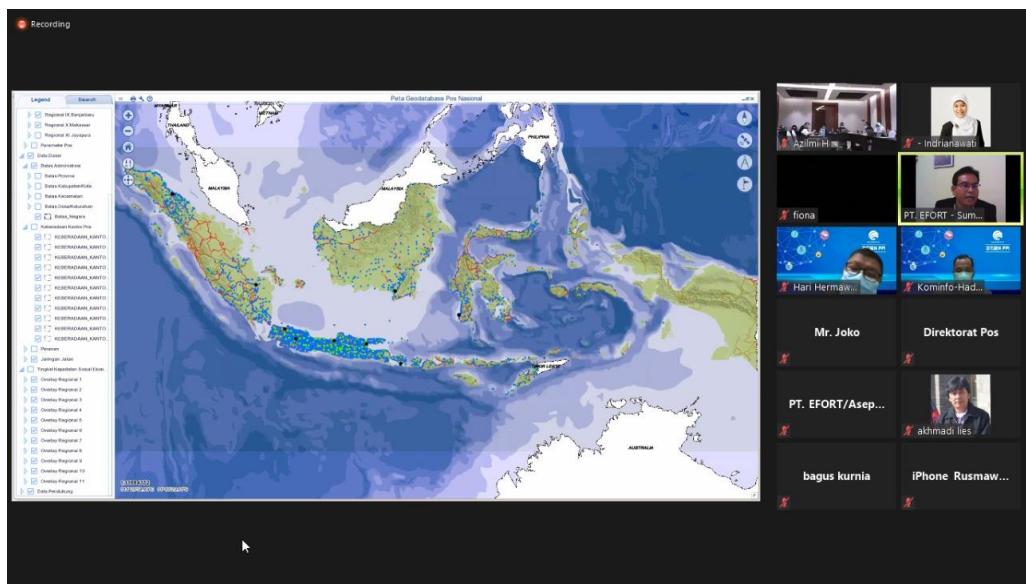
### REGIONAL X MAKASSAR



No.	Kategori	Jumlah	Pos/Individu
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemerintah (KPPR)	16	-
3.	Sentral Pengolahan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPC-DK)	41	-
5.	Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPC-LK)	317	242
6.	Loket Ekstensi (LE)	28	-
	Total	403	

Tingkat Kepedulian Sosial-Ekonomi	Jumlah Kantor Pos Cabang	Rasio Evaluasi
Rendah	277	Diperbaikkan
Sedang	57	Diperbaikkan
Tinggi	24	Dikembangkan
<b>Jumlah</b>	<b>358</b>	





## PEMETAAAN JARINGAN WILAYAH PENYELENGGARA POS



### Maksud, Tujuan & Lingkup Kegiatan

**Maksud :** Melakukan pemetaan titik layanan pos di wilayah NKRI berbasis digital

**Tujuan :** Tersedianya data titik layanan pos berbasis digital di wilayah NKRI untuk mendukung pemerataan akses layanan pos sehingga aksesibilitas masyarakat dalam menerima dan mengirim layanan Pos dapat terlayani

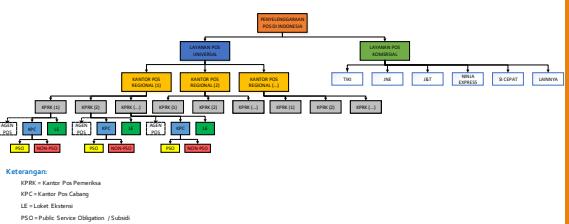
#### Lingkup Kegiatan :

- (1) Mengidentifikasi sebaran titik layanan pos universal dan menyusun konsep wilayah layanan pos universal dengan mempertimbangkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur jumlah penduduk, infrastruktur dan perpindahan penduduk.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi melalui survei lapangan serta pemetaan titik layanan terhadap suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan letak geografis yang dilakukan di daerah Regional Pos.
- (3) Mengumpulkan data dan menganalisa hasil survei dari masing-masing Regional dalam bentuk data base titik layanan pos universal.
- (4) Membuat rekomendasi kitteratan penyediaan titik layanan pos universal di wilayah NKRI.
- (5) Menyusun Laporan kegiatan

### Pendahuluan

- Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional, sektor pos dan logistik memiliki peranan penting mendukung kelancaran perekonomian bangsa sebagai salah satu rangkaian distribusi surat atau paket hingga sampai kepada alamat tujuan konsumen (UU No.38/2009)
- Para penyelenggara pos belum tersedia secara detail, khususnya **pengetahuan layanan pos universal**, dimana pada setiap kantor cabang di kota kecil yang kondisinya tidak layak secara usaha dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan ketentuan kantor pos cabang berada di kota ibu Kota/Kabupaten.
- Diperlukan sebuah perangkat aplikasi yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah untuk melakukan pemetaan jaringan penyelenggara pos.
- Perlu dilakukan **kegiatan pemetaan penyelenggara pos** yg lebih terperinci dan menjadi acuan regulator dalam pemetaan kantor.

### Hirarki Penyelenggaraan Pos:



Survey Lapangan dilakukan di Kantor Pos Regional untuk mengakses data/informasi Kantor Pos Regional, KPR, KPC (PSO & Non-PSO) dan LE

#### Lokasi Survei:

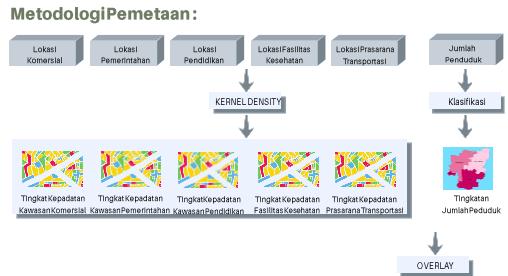
No	Kantor Regional	Lingkup Area
1	Regional I Pusat Medan	1) Prov. Negeri Aceh dan Sulawesi 2) Prov. Sumatera Utara
2	Regional II Pusat Padang	3) Prov. Riau 4) Prov. Sumatera Selatan 5) Prov. Sumatera Barat 6) Prov. Bengkulu
3	Regional III Pusat Palembang	7) Prov. Jambi 8) Prov. Sumatera Selatan 9) Prov. Sumatera Barat 10) Prov. Kalimantan Selatan dan Bengkulu
4	Regional IV Pusat Jakarta	11) Prov. DKI Jakarta 12) Banten 13) Jawa Barat 14) Jawa Tengah
5	Regional V Pusat Bandung	15) Prov. Jawa Barat 16) Prov. Jawa Tengah
6	Regional VI Pusat Semarang	17) Prov. Java Tengah 18) Prov. Jawa Timur 19) Prov. Kalimantan Timur
7	Regional VII Pusat Surabaya	20) Prov. Jawa Timur 21) Prov. Jawa Tengah 22) Prov. Kalimantan Timur 23) Prov. Kalimantan Selatan
8	Regional VIII Pusat Denpasar	24) Prov. NusaTenggara Barat 25) Prov. NusaTenggara Timur 26) Prov. Bali
9	Regional IX Pusat BangkaBerau	27) Prov. Kalimantan Selatan 28) Prov. Kalimantan Timur 29) Prov. Kalimantan Utara 30) Prov. Kalimantan Barat
10	Regional X Pusat Makassar	31) Prov. Gorontalo 32) Prov. Sulawesi Utara 33) Prov. Sulawesi Tengah 34) Prov. Sulawesi Selatan 35) Prov. Sulawesi Tenggara 36) Prov. Sulawesi Selatan 37) Prov. Maluku 38) Prov. Maluku Utara 39) Prov. Papua
11	Regional XI Pusat Jayapura	40) Prov. Papua

### DATA HASIL SURVEY LAPANGAN :

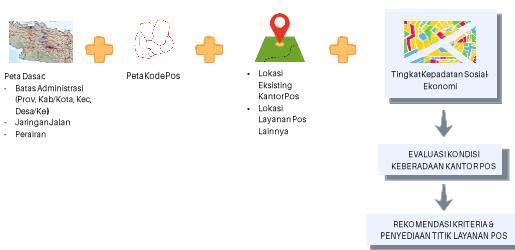
1. Nama Kantor Pos
2. Jenis Kantor Pos (Kantor Regional, KPR, KPC [PSO & Non-PSO] dan LE)
3. Tipe Kantor Pos
4. Kode Kantor Pos
5. Singkatan Kantor Pos
6. Alamat Kantor Pos (Alamat, Desa/Kel, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi)
7. Lokasi Koordinat Kantor Pos
8. Nomor Telepon
9. Nomor Fax
10. Status Kepemilikan Bangunan
11. Jam Layanan
12. Jenis Pelayanan
13. Jumlah SDM
14. Jumlah Produksi/Pelarungan
15. Kerjasama yang dilakukan
16. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pos
17. Informasi Lainnya (website, email, facebook, twitter, dls)

## **DATA SEKUNDER YANG DIGUNAKAN:**

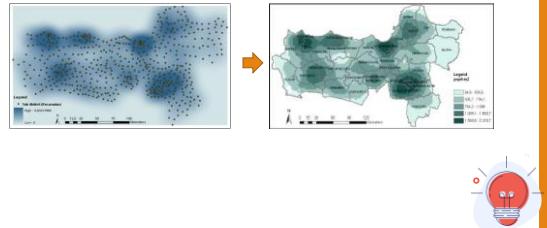
No	Data Sekunder	Sumber	Tahun
1.	Peta Batas Administrasi (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	BIG	2020
2.	Peta Perairan (Sungai, Danau, dll)		
3.	Peta Jaringan Jalur		
4.	Data Kode Pos Nasional	Kemendagri	2020
5.	Data Jumlah Penduduk per Kecamatan	BPS	2019
6.	Sebaran Prasarana Transportasi (Lokasi Stasiun, Terminal, Bandara, Pelabuhan)		
7.	Sebaran Lokasi Komersial		
8.	Sebaran Lokasi Pemerintahan	Instansi/Lembaga Lainnya	2018-2020
9.	Sebaran Lokasi Pendidikan		
10.	Sebaran Lokasi Fasilitas Kesehatan		
11.	Sebaran Lokasi Layanan Pos Lainnya		



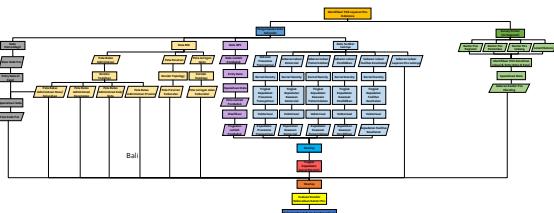
## Metodologi Pemetaan



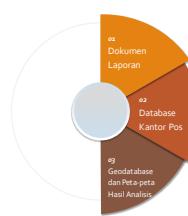
## KernelDensity



## Teknis Pelaksanaan



#### **Produk Akhir yang disampaikan :**



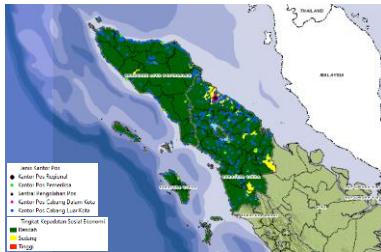
- Laporan Pendahuluan
  - Laporan Kemajuan
  - Laporan Akhir
  - Executive Summary

Databases Kantor Pos Hasil analisis dan verifikasi lapangan:

  - Kantor Pos Regional
    - Kantor Pos Pemeriksa (KPPN)
    - Sentral Pengalihan Pos (SPP)
    - Kantor Pos Pelabuhan Kedua (KPK-II)
    - Kantor Pos Gubang Luar Kota (CPG-LK)
    - Kantor Elekstensi (LE)

• Griddatabase (Data Dasi, Tematik, Data Pendukung)

• Pet-a-peta Hasil analisis

**HASIL KEGIATAN : REGIONAL I MEDAN**

No.	Urutan	Jumlah	PKU/Subseku
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemeriksa	19	-
3.	General Pengelolaan Pos (SPP)	1	-
4.	Kantor Pos Cukir Dalam Kota (KPC-DK)	31	-
5.	Kantor Pos Cukir Luar Dalam Kota (KPC-LK)	272	221
6.	Loker Elektronik (LE)	-	-
	Total	324	-

No.	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting
1	Nangroe Aceh Darussalam	104	7 KPRK, 6 KPC-DK, 91 KPC-LK
2	Sumatera Utara	220	1 Kantor Regional, 1 SPP, 12 KPRK, 25 KPC-DK, 181 KPC-LK

**Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional I Medan**

No.	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan			
			Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Nangroe Aceh Darussalam	104	7 KPRK, 6 KPC-DK, 91 KPC-LK			
2	Sumatera Utara	220	1 Kantor Regional, 1 SPP, 12 KPRK, 25 KPC-DK, 181 KPC-LK			

No.	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting	Tidak Ada Kantor Pos
1	Nangroe Aceh Darussalam	23	289	23
2	Sumatera Utara	33	427	33
	Jumlah	303	706	56

**REGIONAL II PADANG**

No.	Urutan	Jumlah	PKU/Subseku
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemeriksa	19	-
3.	General Pengelolaan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cukir Dalam Kota (KPC-DK)	54	1
5.	Kantor Pos Cukir Luar Dalam Kota (KPC-LK)	179	122
6.	Loker Elektronik (LE)	18	-
	Total	248	-

No.	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting
1	Riau	86
2	Kepulauan Riau	48
3	Sumatera Barat	134

**Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional II Padang**

No.	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan			
			Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Riau	86	5 KPRK, 12 KPC-DK, 59 KPC-LK, 10 LE			
2	Kepulauan Riau	48	2 KPRK, 16 KPC-DK, 26 KPC-LK, 5 LE			
3	Sumatera Barat	134	1 Kantor Regional, 9 KPRK, 26 KPC-DK, 95 KPC-LK, 3 LE			

No.	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting			
			Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Riau	12	163	12	76	12
2	Kepulauan Riau	7	64	7	38	7
3	Sumatera Barat	19	176	19	109	17
	Jumlah	32	303	37	123	67

**REGIONAL III PALEMBANG**

No.	Urutan	Jumlah	PKU/Subseku
1.	Kantor Pos Regional	1	-
2.	Kantor Pos Pemeriksa	17	-
3.	General Pengelolaan Pos (SPP)	-	-
4.	Kantor Pos Cukir Dalam Kota (KPC-DK)	46	-
5.	Kantor Pos Cukir Luar Dalam Kota (KPC-LK)	279	218
6.	Loker Elektronik (LE)	4	-
	Total	347	-

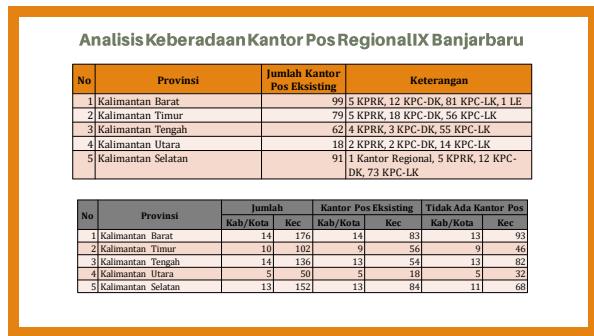
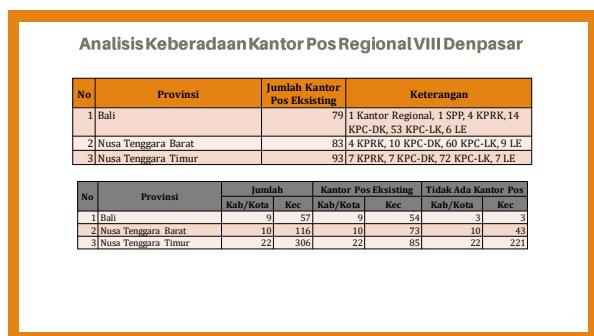
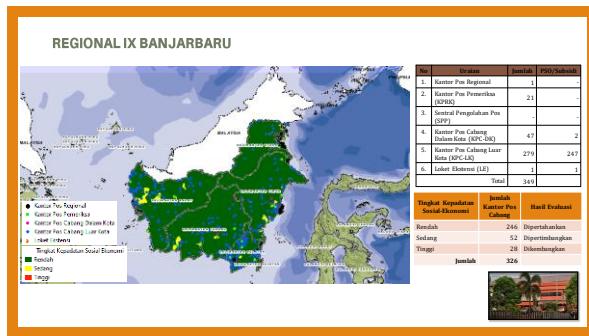
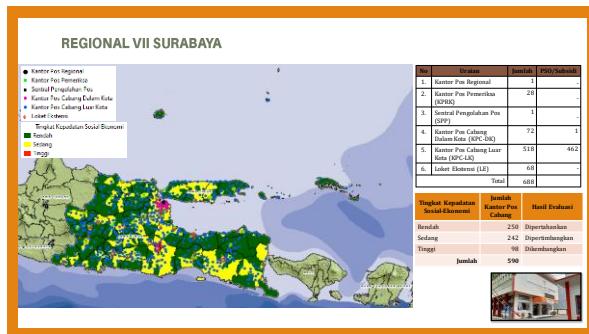
No.	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting
1	Bengkulu	50
2	Jambi	65
3	Lampung	106
4	Sumatera Selatan	109
5	Kepulauan Bangka Belitung	17

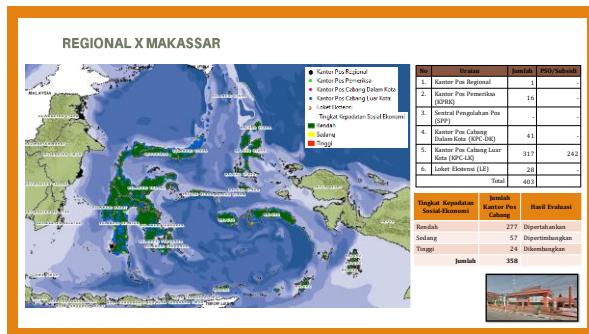
**Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional III Palembang**

No.	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan			
			Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Bengkulu	50	2 KPRK, 9 KPC-DK, 39 KPC-LK			
2	Jambi	65	3 KPRK, 62 KPC-LK			
3	Lampung	106	3 KPRK, 15 KPC-DK, 87 KPC-LK, 1 LE			
4	Sumatera Selatan	109	1 Kantor Regional, 7 KPRK, 22 KPC-DK, 76 KPC-LK, 3 LE			
5	Kepulauan Bangka Belitung	17	2 KPRK, 15 KPC-LK			

No.	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting			
			Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Bengkulu	10	127	10	47	10
2	Jambi	15	138	11	57	11
3	Lampung	15	225	15	97	15
4	Sumatera Selatan	17	230	17	90	17
5	Kepulauan Bangka Belitung	7	47	7	17	7
	Jumlah	32	700	52	239	30







#### Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional X Makassar

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Gorontalo	19	1 KPRK, 1 KPC-DK, 14 KPC-LK, 3 LE
2	Sulawesi Utara	65	2 KPRK, 8 KPC-DK, 55 KPC-LK
3	Sulawesi Tengah	58	2 KPRK, 6 KPC-DK, 50 KPC-LK
4	Sulawesi Barat	19	1 KPRK, 18 KPC-DK
5	Sulawesi Tenggara	54	2 KPRK, 10 KPC-DK, 46 KPC-LK
6	Sulawesi Selatan	122	1 Kantor Regional, 5 KPRK, 15 KPC-DK, 83 KPC-LK, 10 LE
7	Maluku	40	2 KPRK, 3 KPC-DK, 28 KPC-LK, 7 LE
8	Maluku Utara	26	1 KPRK, 2 KPC-DK, 23 KPC-LK

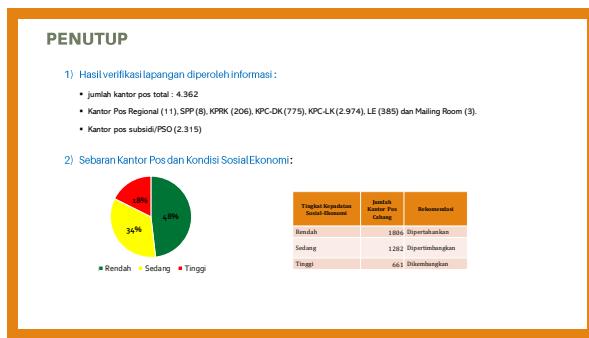
No	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting	Tidak Ada Kantor Pos
	Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Gorontalo	6	77	6
2	Sulawesi Utara	15	167	15
3	Sulawesi Tengah	13	172	13
4	Sulawesi Barat	6	69	6
5	Sulawesi Tenggara	17	213	17
6	Sulawesi Selatan	24	306	24
7	Maluku	11	89	10
8	Maluku Utara	10	112	10



#### Analisis Keberadaan Kantor Pos Regional XI Jayapura

No	Provinsi	Jumlah Kantor Pos Eksisting	Keterangan
1	Papua Barat	18	2 KPRK, 3 KPC-DK, 13 KPC-LK
2	Papua	53	1 Kantor Regional, 1 SPP, 5 KPRK, 4 KPC-DK, 42 KPC-LK

No	Provinsi	Jumlah	Kantor Pos Eksisting	Tidak Ada Kantor Pos
	Kab/Kota	Kec.	Kab/Kota	Kec.
1	Papua Barat	13	179	10
2	Papua	29	431	211



#### PENUTUP

### Rekomendasi

- ✓ Selain melaksanakan survei langsung ke Kantor Regional, untuk melengkapi data juga disediakan formisian secara online yang dapat diakses dan diisi oleh kantor regional atau kantor cabang secara langsung (<https://forminfo.kominfo.go.id/15238913045>) - form ini bisa digunakan untuk update secara kontinyu.
- ✓ Formisian untuk kelembagaan pusat survei tidak perlu dilakukan secara online dengan fiturungah foxo dengan geotagging sehingga koordinat lokasi dapat langsung diketahui.
- ✓ Pemetaan digital dibangun menggunakan **geodatabase standar** dan menggunakan peta **dasar nasional**, geodatabase ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data pendukung Pos dengan tematika lain, sekaligus dapat dikembangkan untuk analisis spasial lainnya.
- ✓ Direktorat Pos, Kementerian Kominfo perlu melakukan **survey** dan **pengumpulan data** terhadap Perusahaan Jasa Tilpan lainnya dan/atau penyelenggara Layanan Pos Komersial guna menambah perpendekhaan dan database.



### Terimakasih